

KADERISASI ULAMA DI PERSIMPANGAN JALAN



Khamami Zada

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pada masa sekarang, masyarakat cenderung bergerak ke arah modernisasi. Fenomena ini ditandai dengan ciri di mana setiap pekerjaan membutuhkan tenaga-tenaga professional, pola kehidupan konsumtif semakin tinggi, kompetisi di segala bidang semakin ketat dan konsep individualistis semakin menyolok¹. Modernisasi sejatinya bukanlah ancaman bagi perkembangan masyarakat karena modernisasi juga menyuguhkan nilai-nilai yang progresif bagi masyarakat. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengakomodir modernisasi dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan Islam di Indonesia kini sedang menghadapi tantangan serius dalam mengakomodir modernisasi. Nilai-nilai profan yang dominan di masyarakat masyarakat sekarang ini

berimplikasi pada orientasi pendidikan Islam. Perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh modernisasi telah membawa perubahan orientasi pendidikan Islam (pesantren, madrasah, dan diniyah). Modernisasi seringkali ditanggapi oleh kalangan pendidikan Islam (pesantren, madrasah, dan madrasah diniyah) dalam konteks nilai-nilai tradisi kulturalnya. Pesantren, madrasah, dan madrasah diniyah baru merespon modernisasi dalam konteks nilai-nilai tradisi kultural yang berubah (atau dapat dirubah)². Padahal, modernisasi telah mengubah alam berpikir masyarakat yang lebih pragmatis bahwa pendidikan diorientasikan pada kebutuhan pasar. Dalam posisi demikian, modernisasi menuntut adanya perubahan tujuan pendidikan Islam, tidak lagi *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama), melainkan pendidikan yang mampu menyediakan ruang-ruang kepentingan ekonomi, politik, dan sosial secara profesional.

Dalam gerak selanjutnya, pendidikan Islam tidak lagi diwadahi dalam konsep lama yang bersifat kultural, tetapi kini telah berubah; bergerak ke arah yang formal. Formalisasi pendidikan Islam dalam seluruh lini (mulai dari pesantren, madrasah, dan madrasah diniyah) telah

¹Sudjito S., *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), h. 1-15.

²M. Yusuf Chudori, "Interaksi Pesantren dengan Nilai-nilai Modernitas" Makalah Simposium Nasional Pendidikan Agama dan Keagamaan, 4-7 Oktober 2011 di Yogyakarta, h. 103.

mengubah orientasi pendidikannya, yakni tidak orientasi pada *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama). Orientasi *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama) tampaknya kini sudah tidak lagi menjadi orientasi utama dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pesantren, madrasah, dan madrasah diniyah sebagai tumpuan utama dalam pendidikan Islam mulai kehilangan orientasi awalnya. Implikasi yang paling mengkhawatirkan dari pergeseran ini sesungguhnya adalah krisis ulama karena lulusan pesantren, madrasah, dan madrasah diniyah tidak lagi dapat diharapkan mampu menguasai ilmu-ilmu agama secara komprehensif.

Pergeseran Orientasi Pesantren

Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik (tahun 1916). Baru pada akhir abad ke-19, Belanda atas saran Snouck Hurgronje mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonialnya dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa. Pesantren selalu waspada terhadap politik etis Belanda. Setelah menyadari perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya, maka baru pada awal abad ke-20, pesantren memperkenalkan sistem klasikal yang disebut madrasah³. Dinamika yang begitu panjang dari lembaga pendidikan seperti pesantren telah melahirkan intelektualisme Islam di Indonesia.

³Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 207), h. 226-227

Dalam sejarahnya, pesantren merupakan fondasi dasar dari kaderisasi ulama. Di pesantrenlah, *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama) menjadi orientasi utama dalam pengembangan pendidikan Islam sejak zaman dahulu. Pesantren telah menjadi basis yang utama dalam melahirkan para ulama sejak berabad-abad. Di pesantren lah, banyak santri belajar ilmu-ilmu agama, baik dalam bentuk bandongan maupun sorogan. Kyai mengajarkan kepada santrinya tentang ilmu-ilmu agama. Belajar kitab telah menjadi tumpuan utama pesantren dalam mencetak para ulama. Jika seseorang ingin belajar ilmu Nahwu, Hadits, Fiqih, dan Tafsir, dia tinggal menuju pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu di atas melalui para kyai yang ada. Pesantren adalah sumber rujukan dalam penguasaan ilmu-ilmu agama. Tak mengherankan jika banyak ulama lahir dari pendidikan pesantren.

Ulama-ulama Nusantara, seperti Syamsuddin al-Sumatrani, Nurudin al-Raniri, Abdul Rauf Singkel, dan Abdul Samad al-Palimbani, Syekh Yusuf al-Makasari, Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Nawawi al-Bantani, atau Syekh Ahmad Khatib sesungguhnya telah menjadi fondasi awal dari kaderisasi ulama. Cikal bakal inilah yang kemudian melahirkan generasi selanjutnya yang berakar pada pendidikan pesantren, seperti, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Musthofa. Pesantren hadir sebagai jawaban atas panggilan keagamaan untuk menegakkan nilai-nilai ajaran agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama

dan mengatur hubungan antar mereka. Secara pelan-pelan, pesantren berupaya merubah dan memperkembangkan cara hidup masyarakat nusantara yang mampu menampilkan intelektualisme Islam. Akhirnya dapat terekam dalam sejarah berikutnya bahwa tokoh-tokoh seperti KH. Achmad Siddiq, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ali Yafie, KH. Sjechul Hadi Permono, KH. Muhammad Tholchah Hasan, KH. Abdul Muchith Muzadi, KH. M.A. Sahal Mahfudh, KH. Said Agil Siradj, dan KH. Masdar Farid Mas'udi⁴ adalah para ulama sekaligus intelektual Islam yang lahir dari jantung pendidikan Islam, yaitu pesantren.

Namun seiring laju modernisasi yang begitu deras, perubahan sosial terjadi begitu cepat. Pesantren pun merespon perubahan sosial. Perubahan besar yang terjadi di pesantren adalah masuknya sekolah sebagai pendidikan formal. Pesantren merespon arus modernisasi dengan menyediakan layanan pendidikan formal (sekolah). Masuknya sekolah di pesantren ternyata direspon positif oleh masyarakat sehingga mereka mengirimkan anak-anaknya belajar di sekolah yang berada di pesantren. Belajar di pesantren pun tidak lagi hanya belajar agama, tetapi juga pendidikan umum.

Dalam perkembangannya, pesantren yang mengakomodir sekolah dengan kurikulum nasional tampak lebih menjanjikan ketimbang pesantren yang menggunakan kurikulum sendiri berdasarkan kitab kuning. Pesantren yang berorientasi pada pengajaran kitab kuning cenderung lambat, sebaliknya pesantren mengakomodir sekolah yang berorientasi

pada kurikulum nasional cenderung berkembang pesat.⁵ Fenomena inilah yang menjadikan pesantren dalam beberapa dekade terakhir ramai-ramai menyediakan layanan pendidikan formal dalam bentuk pendidikan formal sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Pesantren mengalami perubahan signifikan dengan menyediakan layanan pendidikan Islam, di samping layanan pendidikan Islam⁶ lainnya, seperti pendidikan diniyah dan pengajian kitab.

Pesantren Darul Ulum, Jombang sejak 1960-an telah memasukkan pendidikan umum ke dalam sistem pendidikan sekolah. Bersamaan dengan masuknya pendidikan sekolah di pesantren, para kyai kemudian memformalkan pesantren ke dalam bentuk badan hukum, berupa yayasan. Para kyai berasumsi bahwa sekiranya pengaruh luar, terutama sistem pendidikan sekolah (formal) yang dibentuk pemerintah tidak dapat dihindarkan, maka pesantren tidak perlu menghindar apalagi menolaknya, bagaimanapun lambat laun pasti berjalan dan pengaruh itu pun tetap ada⁷. Asumsi para kyai Pesantren Darul Ulum ternyata benar. Pesantren sepertinya tidak bisa lagi menghindar dari arus pendidikan formal di pesantren. Banyak pesantren membuka layanan pendidikan formal, di samping pengajaran kitab kuning yang selama ini menjadi trademark pesantren.

Dalam kondisi inilah, orientasi

⁵Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 5.

⁶M.Amin Haedari, "Prolog" dalam Nunu Ahmad an-Nahidh, dkk., *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemendagri RI, 2010), h. ix.

⁷Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, h. 15.

⁴Mujamil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlul Sunnah ke Uni-versalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002).

pesantren sejatinya telah berubah. Pesantren tidak lagi berorientasi untuk memproduksi ulama⁸. Perubahan layanan pendidikan di pesantren ini seiring dengan riset Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI (2010) yang menemukan bahwa minat santri belajar di pesantren tidak lagi fokus pada belajar agama (*tafaqquh fid din*), tetapi santri juga tertarik belajar ilmu-ilmu umum dan keterampilan (kemandirian) di pesantren. Kecenderungan ini merupakan proses pergeseran orientasi pesantren yang sangat signifikan. Padahal, image yang melekat di masyarakat selama ini, belajar di pesantren adalah belajar agama (*tafaqquh fid din*). Karena itulah, pesantren-pesantren yang selama ini dikenal sebagai pesantren salaf murni telah berubah dengan mengadopsi dan menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan umum.⁹

Modernisasi pesantren ini sesungguhnya telah melahirkan konsepsi baru, yang dulu ditentang oleh pesantren. Dulu terjadi dikotomi pesantren dan sekolah. Kalangan pesantren banyak yang bersikap skeptis terhadap keberadaan sekolah. Sekolah dipandang tidak mampu melahirkan anak didik yang memiliki pengetahuan keagamaan yang luas (*tafaqquh fid din*). Apalagi sekolah adalah pendidikan yang dilahirkan oleh Belanda, sehingga skeptisisme melekat dalam alam pikir kalangan pesantren. Kenyataannya sekarang, pesantren sudah tidak alergi lagi dengan sekolah. Justru pesantren

berlomba-lomba mendirikan sekolah dari tingkat Kanak-kanak (TK/RA) sampai perguruan tinggi.

Warna takhassus yang dulu melekat dalam pendidikan pesantren, sekarang sudah mulai bergeser ke sekolah. Perubahan orientasi masyarakat yang tidak lagi mengarah kepada pendidikan takhassus di pesantren mengakibatkan pesantren mengakomodasi "selera pasar". Pasar, sekarang ini, menginginkan pesantren yang menyediakan sekolah/ perguruan tinggi. Akibatnya, pesantren membuka layanan pendidikan formal sekolah/ perguruan. Orang tua murid tidak lagi menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan agama semata, tetapi menginginkan pendidikan sains, matematika, dan bahasa yang berkualitas. Ibaratnya, sambil belajar agama, peserta didik mendapatkan pendidikan sekolah.

Kebijakan Madrasah dan Keterdesakan Pendidikan Diniyah dan TPQ

Pada awalnya, madrasah tumbuh dan berkembang dengan karakteristiknya yang khas dan berbeda dengan sekolah. Madrasah dibangun oleh individu dan masyarakat Muslim sebagai wujud kesadaran dalam melestarikan *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama). Dalam perkembangannya, madrasah terpaksa menerima modernitas seiring dengan perubahan zaman. Dampaknya adalah pergeseran paradigma yang tidak dapat dihindari dalam kerangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan perubahan. Madrasah pun disejajarkan dengan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Ini berarti madrasah telah digeser dari jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fokus pada *tafaqquh fid din*

⁸Analisis ini tidak bersifat generalisasi karena masih terdapat pesantren yang mengkhususkan pada *tafaqquh fid din* untuk melahirkan ulama yang handal.

⁹Nunu Ahmad an-Nahidh, dkk., *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, h. 135.

(penguasaan ilmu agama) ke arah yang relatif sama dengan sekolah. Madrasah didorong menjadi lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Muatan kurikulumnya adalah sama dengan sekolah, hanya saja madrasah masih menyisakan ciri khas keislamannya dengan mata pelajaran agama yang tidak sekuat dan sedalam dulu pada awal terbentuknya¹⁰.

Akibat pergeseran ini, madrasah tidak saja menjadikan lulusannya serba tanggung antara mata pelajaran agama dan umum. Bahkan justru mengantarkan siswa madrasah meninggalkan orientasi *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama) ke pola pikir yang serba pragmatis dan materialistik. Secara sederhana, pada akhirnya, modernisasi madrasah lebih mudah dipahami sebatas pengalihan konsentrasi siswa dan ketekunan mempelajari agama, menjadi kesungguhan mempelajari mata pelajaran umum¹¹.

Perubahan kebijakan negara terhadap madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional telah menjadikan madrasah kehilangan spiritnya dalam menyumbangkan lulusannya yang menguasai ilmu-ilmu agama. Bahkan, Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang diorientasikan pada penguasaan ilmu-ilmu agama dikebiri beberapa kali. Pertama, MAPK dikebiri menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), yang menjamur di seluruh

Madrasah Aliyah di Indonesia. Akibatnya, kualitas MAK tidak lagi terjaga. Setiap Madrasah Aliyah dapat membuka MAK. Berbeda dengan MAPK yang memiliki orientasi penguasaan keislaman yang lebih mendalam dengan perhatian yang besar dari Menteri Agama Munawir Sjadzali, MAK tidak banyak mendapatkan perhatian dari Kementerian Agama di masa Tarmizi Tahir. Implikasinya, kualitas MAK kalah jauh dengan MAPK. Kedua, penghapusan MAK semakin mengukuhkan orientasi *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama) hilang dalam pendidikan madrasah. Setelah tidak banyak mendapat perhatian dari Kementerian Agama, MAK malah dihapus digantikan dengan Madrasah Aliyah Kejuruan. Perubahan kebijakan ini tampaknya menyelaraskan Madrasah Aliyah Kejuruan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional. Ironisnya, sampai sekarang Madrasah Aliyah Kejuruan belum kelihatan seapak terjangnya dalam kancah pendidikan nasional.

Gelombang serangan modernisasi pendidikan tidak hanya menghantam pesantren dan madrasah, pendidikan *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama) yang berkembang di masyarakat (di luar pesantren), seperti pendidikan diniyah juga mulai terdesak. Bahkan, di perkotaan mengalami keterpurukannya. Pendidikan diniyah sekarang ini hampir sudah tidak banyak ditemukan di perkotaan. Madrasah diniyah yang dulu tumbuh dan berkembang sebagai lembaga *tafaqquh fid din*¹² mulai

¹⁰M. Amin Haedari, "Agenda dan Tantangan Pendidikan Madrasah di Indonesia" dalam Nunu Ahmad an-Nahidh, dkk., *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), h. xii.

¹¹M. Amin Haedari, "Agenda dan Tantangan Pendidikan Madrasah di Indonesia", h. xii.

¹²Khamami Zada, "Akar Pendidikan Madrasah di Indonesia", Makalah Kontributif dalam Workshop Pengembangan Madrasah Marjinal, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 23-25 Maret 2009.

redup ditinggal masyarakat. Praktis, hanya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) masih eksis, meskipun mulai kehilangan daya tariknya. Madrasah diniyah dan TPQ tidak terkelola dengan baik, dan bahkan cenderung dikelola seadanya. Padahal, dua lembaga pendidikan Islam ini menjadi basis dasar dari pendidikan keagamaan Islam masyarakat.

Keterdesakan Madrasah Diniyah dan TPQ sejatinya bukan disebabkan oleh kualitas Madrasah Diniyah dan TPQ yang menurun, tetapi lebih pada perubahan orientasi pendidikan yang lebih formalistik. Pendidikan formal telah menjadi panglima dalam iklim pendidikan di Indonesia. Akibatnya, ketika Sekolah Islam Terpadu menawarkan konsep penggabungan sekolah dengan Madrasah Diniyah dan TPQ, mengakibatkan Madrasah Diniyah dan TPQ mulai ditinggalkan masyarakat. Madrasah Diniyah dan TPQ yang selama ini menjadi tumpuan dari pendidikan Islam di tingkat yang paling dasar mulai digeser oleh kemunculan Sekolah Islam Terpadu.

Riset Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI (2010) telah membuktikan terjadinya penurunan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah Diniyah yang disebabkan oleh program tambahan di SD dan tertariknya masyarakat kelas menengah ke atas yang menyekolahkan anaknya ke SDIT¹³. Perubahan minat masyarakat ini sesungguhnya disebabkan oleh perubahan zaman, yang lebih menginginkan pendidikan formal. Itu sebabnya, Sekolah Islam Terpadu lebih dipilih

oleh masyarakat perkotaan ketimbang Madrasah Diniyah.

Dari aspek materi pendidikan Islam, Sekolah Islam Terpadu sesungguhnya masih kalah kualitas dengan Madrasah Diniyah. Tetapi keunggulan yang dimiliki Sekolah Islam Terpadu adalah pada aspek formalitasnya. Siswa-siswa yang belajar di Sekolah Islam Terpadu disejajarkan dengan sekolah karena masuk dalam pendidikan formal. Madrasah Diniyah tidak dapat diakui sebagai pendidikan formal sehingga masyarakat tidak tertarik dengan Madrasah Diniyah. Ibaratnya, dengan menyekolahkan anaknya di Sekolah Islam Terpadu, orang tua merasa yakin bahwa anaknya mendapatkan pendidikan agama yang cukup dan pendidikan umum yang berkualitas.

Ma'had Aly: Pusat Kaderisasi Ulama

Krisis ulama yang sedang terjadi di dunia pendidikan Islam direspon Azyumardi Azra. Azra tampaknya ingin mendekonstruksi pengertian ulama sebagai kyai yang berakar di pesantren tradisional. Menurutnya, pengertian ulama seharusnya dirubah, tidak lagi mempertahankan pengertian lama. Jika pemahaman tersebut dirubah dengan memaknai ulama sebagai orang yang memiliki pemahaman keagamaan Islam yang luas, sekaligus mampu membaca kitab kuning, maka sebenarnya tidak terjadi krisis ulama.¹⁴ Respon ini sesungguhnya ingin memasukkan para intelektual Islam kampus yang memiliki kapasitas keilmuan Islam yang mumpuni, tetapi tidak memiliki akar pesantren yang

¹³Lihat Nunu Ahmad an-Nahidh, dkk., *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, h. 325.

¹⁴Azyumardi Azra, "Kritik terhadap Ulama Muhammadiyah" dalam Azyumardi Azra, *Islam Substantif, Agar Umat Tidak Menjadi Buih*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 49.

kuat.

Namun, kalangan pesantren merespon krisis ulama dengan cara lain, yaitu mendirikan Ma'had Aly. Ide awalnya lahir pada 1989 dari hasil konsensus para kyai pesantren yang dimotori KH As'ad Syamsul Arifin. Beberapa tahun kemudian didirikanlah Ma'had Aly di sejumlah daerah, yaitu Ma'had Aly di PP. Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, PP. Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, PP. Al-Falah, Ploso, Kediri, PP. Al-Hikmah, Sirampog, Brebes, PP. Maslakul Huda, Pati, PP. Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, PP. Sunan Pandanaran, Sleman, PP. Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, dan PP. Darut Tauhid, Arjawinangun, Cirebon.¹⁵

Kehadiran Ma'had Aly tidak bisa dipisahkan dari obsesi para ulama untuk mewujudkan cita-cita besar, yaitu membangun kembali pesantren sebagai center of excellences dengan bantuan tradisi keilmuan pesantren berbasis kitab klasik dalam kerangka menghasilkan calon-calon ulama. Ma'had Aly tampil sebagai pusat studi keislaman dan pendidikan kader ulama dan fukaha terkemuka di Indonesia. Misinya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya keislaman secara menyeluruh serta dapat mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren yang mampu mengembangkan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) dalam bingkai ajaran Islam.¹⁶

Ide besar untuk melakukan kaderisasi ulama melalui Ma'had Aly pada awalnya begitu menggema di kalangan pesantren. Hiruk-pikuk Ma'had Aly telah menjadi kebanggaan para kyai

untuk mengikis krisis ulama. Sayangnya, Ma'had Aly kini kurang greget. Tidak seperti pada awalnya pendiriannya yang begitu menggelegar, Ma'had Aly sekarang ini kehilangan gairahnya. Perbincangan tentang Ma'had Aly seperti tak terdengar lagi. Obsesi Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan pesantren yang fokus pada *tafaqquh fid din* perlu ditinjau lagi oleh para ulama pesantren dan Kementerian Agama.

Terobosan untuk memikirkan lembaga pendidikan Islam yang mampu melahirkan ulama sudah tidak lagi dibebankan kepada madrasah dan madrasah diniyah. Pesantren sesungguhnya masih menyisakan ruang yang cukup luas untuk kembali memikirkan pendidikan Islam yang mampu melahirkan ulama. Pesantren Salafiyah dan Ma'had Aly sejatinya dapat memberi sumbangan penting bagi proses kaderisasi ulama.

Usaha ini dapat terwujud jika pemerintah dapat membuat kebijakan yang strategis kepada Pesantren Salafiyah dan Ma'had Aly. Formalisasi pendidikan Islam yang selalu dialamatkan kepada sejumlah lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah diniyah, Pesantren Salafiyah, dan juga Ma'had Aly bisa jadi akan kembali membawa penghapusan orientasi *tafaqquh fid din* Pesantren Salafiyah, dan Ma'had Aly. Upaya pemerintah untuk memajukan Pesantren Salafiyah, dan Ma'had Aly bukannya membawa perubahan yang berarti, malah sebaliknya menjadi seluruh lembaga pendidikan Islam kehilangan orientasi *tafaqquh fid din* (penguasaan ilmu agama). Inilah petaka yang harus diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia di masa-masa yang akan datang. []

¹⁵Nunu Ahmad an-Nahidh, dkk., *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, h. 149.

¹⁶Nunu Ahmad an-Nahidh, dkk., *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, h. 149-150.